



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	10 (<i>sepuluh</i>)
Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI
Hari, Tanggal	:	Rabu, 2 Juni 2021
Pukul	:	13.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan RKP K/L dan RKA K/L Tahun Anggaran 2022
Hadir	:	1. dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perindustrian RI pada pukul 13.39 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 2 Juni 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
3. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor No. AG/03981/DPR RI/ III/2021 tanggal 23 Maret 2021, Perihal Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Tahun 2022).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri Perindustrian RI berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor: S-361/MK.02/2021 dan B238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021, tanggal 29 April 2021, telah ditetapkan Pagu Indikatif Belanja Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.610.978.618.000,- (*Dua Triliun Enam Ratus Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga dan uang makan sebesar Rp797.591.613.000 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*).
 - b. Belanja Operasional meliputi biaya operasional perkantoran serta biaya pemeliharaan peralatan kantor dan gedung sebesar Rp360.576.586.000 (*Tiga Ratus Enam Puluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 - c. Belanja Non-Operasional meliputi kegiatan prioritas nasional dan kegiatan reguler sebesar Rp1.452.810.419.000 (*Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*).Komisi VI DPR RI tidak menyetujui turunnya anggaran di Kementerian Perindustrian RI, Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan membahas masing-masing program lebih lanjut secara detail dalam RDP.
2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian RI TA 2022 sebesar Rp3.009.341.333.000,- (*Tiga Triliun Sembilan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang terbagi menjadi:
 - a. Usulan Inisiatif Program Super Prioritas sebesar Rp1.391.786.000.000,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah*);
 - b. Usulan Inisiatif Program Pendukung sebesar Rp1.617.555.333.000,- (*Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*)
3. Komisi VI DPR RI meminta komitmen Kementerian Perindustrian RI terkait Anggaran Pendidikan sebesar Rp969.000.000.000,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Rupiah*) untuk lebih efektif, efisien dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan daya saing SDM dengan memperbanyak program sosialisasi dan pelatihan untuk industri dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional.
4. Komisi VI DPR RI meminta penjelasan lebih detail dari Kementerian Perindustrian RI terkait Permenperin No. 3 Tahun 2021.
5. Komisi VI DPR RI mendukung agar lembaga pendidikan vokasi berbasis industri dan manufaktur yang saat ini dikelola oleh Kementerian Perindustrian RI tetap di Kementerian Perindustrian dan tidak dipindahkan.

6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Perindustrian RI untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.36 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,



GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.

A-327